

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

##### **4.1.1. Peran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Dalam Mengawasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan pada saat pekerja migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja. Adapun peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia sebelum bekerja ialah dengan melakukan pengawasan terhadap P3MI dan Kantor Cabangnya, melakukan pengawasan terhadap fasilitas layanan kesehatan pemeriksaan Calon Pekerja Migran Indonesia, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi penempatan pekerja migran Indonesia setelah bekerja ialah dengan melakukan pengawasan terhadap pemulangan pekerja migran Indonesia yang bermasalah serta melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian

masalah atau perselisihan pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah Jawa Tengah.

#### **4.1.2. Pelaksanaan Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Terhadap P3MI Masa Pandemi Covid-19**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa pandemi Covid-19 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kelemahan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa yang hanya berjumlah 146 personel pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan beban kerja pengawas ketenagakerjaan yang harus mengawasi seluruh perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang industri maupun jasa seperti perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Selain itu minimnya keterlibatan pelaku eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI menjadi kelemahan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasn terhadap P3MI saat pandemi Covid-19. Kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa

Tengah tidak memiliki SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap P3MI saat pandemi Covid-19. Ketiga, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas yang dibebankan pada bidang pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan secara langsung ke P3MI. Keempat, frekuensi pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap P3MI dilakukan minimal setahun sekali, namun pada masa pandemi Covid-19 pengawasan belum dilakukan secara optimal ke seluruh P3MI yang ada di wilayah Jawa Tengah. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan menerapkan skala prioritas terhadap perusahaan mana yang akan diawasi. Hal ini tertentu berdampak pada pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan ketika ada kasus atau pengaduan saja.

#### **4.2 Saran**

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah khususnya Bidang Pengawas Ketenagakerjaan perlu membuat SOP khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa seperti Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di wilayah Jawa Tengah.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Jawa Tengah seharusnya bukan menjadi penghalang oleh Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah perlunya membuat strategi dalam melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan dengan menggunakan sistem online atau sistem digital secara menyeluruh, serta melibatkan pelaku eksternal dalam melakukan pengawasannya terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).